

TESIS
**ANALISIS DUGAAN PRAKTEK DISKRIMINASI YANG DILAKUKAN PT
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK DAN
PT TELEKOMUNIKASI SELULER TERHADAP NETFLIX TERKAIT PENYEDIAAN
LAYANAN AKSES INTERNET PROVIDER
(STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NO. 08/KPPU-I/2020)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

2023

**ANALISIS DUGAAN PRAKTEK DISKRIMINASI YANG DILAKUKAN
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK DAN
PT TELEKOMUNIKASI SELULER TERHADAP NETFLIX TERKAIT
 PENYEDIAAN LAYANAN AKSES INTERNET PROVIDER
(STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NO. 08/KPPU-I/2020)**

ABSTRAK

(Nadya Muthia Wulandari, 2020112043, Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, 131 hlm, 2023)

Tesis ini membahas terkait analisis dugaan praktik diskriminasi yang dilakukan oleh PT Telkom dan PT Telkomsel terhadap Netflix. Dugaan tersebut muncul dengan dilakukannya pemblokiran layanan akses internet terhadap Netflix oleh Telkom dan Telkomsel pada tanggal 27 Januari 2016 (Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2020). Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif-analitis, melalui penelitian ini, Penulis memberikan analisis dugaan praktik anti persaingan usaha ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum persaingan usaha, khususnya Praktik Diskriminasi sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan analisis penggunaan prinsip *Net Neutrality* pada Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2020 tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Telkom dan PT Telkomsel terbukti melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu yaitu Netflix dengan melakukan pemblokiran terhadap Netflix tapi tidak terhadap layanan SVOD lainnya, namun tindakan tersebut tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Di Indonesia, prinsip *Net Neutrality* dapat diimplementasikan dalam praktik usaha agar ada keseimbangan antara *Internet Service Provider/ISP* dan kepentingan penyedia layanan *Over the Top/OTT*. Disarankan bagi Penyelenggara SVOD, OTT dan ISP untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam menjalankan bisnis dan bagi regulator agar dapat menyusun aturan yang lebih khusus terkait penyelenggaraan usaha di bidang digital yang tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Kata Kunci: *Net Neutrality, Praktik anti persaingan usaha, Praktik Diskriminasi, OTT, ISP, SOVD.*



**ANALYSIS OF ALLEGED DISCRIMINATORY
PRACTICES COMMITTED BY PT TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)TBK AND PT
TELEKOMUNIKASI SELULER AGAINST NETFLIX
REGARDING THE PROVISION OF INTERNET ACCESS
SERVICE PROVIDER**

ABSTRACT

(Nadya Muthia Wulandari, 2020112043, *Master of Law, Andalas University,*
131 pages, 2023)

This thesis discusses the analysis of alleged discriminatory practices committed by PT Telkom and PT Telkomsel against Netflix. The allegation arose with the blocking of internet access services to Netflix by Telkom and Telkomsel on January 27, 2016 (KPPU Decision Number 08/KPPU-I/2020). Through a normative juridical research method with a descriptive-analytical type, through this research, the author provides an analysis of the alleged anti-competitive practices in terms of the applicable laws and regulations regarding business competition law, especially Discriminatory Practices as per article 19 letter d of Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and an analysis of the use of the Net Neutrality principle in KPPU Decision Number 08/KPPU-I/2020. The research results showed that PT Telkom and PT Telkomsel were proven to have discriminatory practices against certain business actor which is Netflix but not against other SVODs, but the action did not result in unfair business competition as stipulated in Article 19 letter d of Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. In Indonesia, the principle of Net Neutrality can be implemented in business practices so that there is a balance between Internet Service Providers (ISP) and the interests of Over the Top (OTT) service providers. It is advisable for SVOD, OTT and ISP companies to comply with the law and regulations that apply in Indonesia in conducting business and for regulators to be able to compile more specific rules related to conducting business in the digital sector that does not result in unfair business competition.

Keywords : Net Neutrality, Anti-competitive practices, Discrimination practices, ISP, OTT, SVOD.